

## **BAB II**

### **DINAMIKA KONFLIK BANGSAMORO**

Pada bab ini akan membahas tentang dinamika konflik Bangsamoro untuk mengetahui asal-usul konflik Bangsamoro itu terjadi dan aktor-aktor siapa saja yang terlibat dalam konflik ini. Bab ini mencakup tiga sub bab penting yaitu: pertama, sejarah konflik Bangsamoro. Kedua, perjuangan Bangsamoro, ketiga, eskalasi konflik yang mengandung pengaplikasian teori konflik dari Johan Galtung dalam melihat dinamika konflik di Filipina Selatan ini.

Sebenarnya Bangsamoro mempunyai banyak kelompok-kelompok pembebasan, akan tetapi dalam sub bab perjuangan Bangsamoro ini akan dijelaskan tentang kelompok-kelompok perjuangan yang terkenal yang sangat berpengaruh terhadap pembebasan Bangsamoro yaitu : *Moro National Liberation Front* (MNLF), *Moro Islamic Liberation Front* (MILF), *Abu Sayyaf Group* (ASG).

#### **A. Sejarah Konflik Bangsamoro**

Islam diperkenalkan pada awal abad keenam belas di daerah Mindanao, dan dua kesultanan utama didirikan. Meskipun berbagai upaya untuk mengasimilasi Muslim ke

dalam kolonial arus utama atau struktur nasional, Mindanao tidak pernah sepenuhnya ditaklukkan oleh orang-orang Spanyol, Amerika, atau Jepang. Gerakan untuk negara Muslim merdeka dimulai pada akhir 1960-an, dan operasi militer skala penuh meletus di tahun 1970. Upaya penyelesaian damai konflik Muslim tidak pernah berhasil dalam jangka panjang, dan mereka masih tetap berlanjut sampai hari ini. Orang-orang Muslim di Mindanao berpusat di Lanao dan Cotabato (sekarang provinsi Lanao del Sur dan Maguindanao), di mana kesultanan Maranao dan Maguindanao didirikan, masing-masing. Maguindanao berarti "orang-orang di dataran kaki," sedangkan Maranao menunjukkan "orang-orang di danau" (Gin, 2004, hal. 891).

Mindanao merupakan kawasan Filipina yang menjadi basis umat Islam dengan kondisi yang memprihatinkan. Filipina Selatan identik dengan kawasan berbahaya, basis kekerasan, konflik, miskin dan tidak terurus. Inti permasalahan di Filipina Selatan tidak lain seputar isu ketidakadilan ekonomi, politik dan perlakuan buruk Pemerintah Filipina atas "Bangsamoro" yang Muslim di Mindanao (Maksum, 2018, hal. 127). Kelompok muslim minoritas di Filipina harus hidup dalam tekanan dan berjuang menentukan nasib mereka sendiri. Kaum Minoritas secara khusus sering dikecualikan atau

terpinggirkan di rumah mereka sendiri, masyarakat minoritas biasanya dianggap sebagai kaum terlemah dalam kemajuan sosial-ekonomi bangsa.

Dalam sejarahnya Mindanao merupakan wilayah mayoritas muslim. Akan tetapi selama masa kolonial Spanyol, mayoritas muslim di Filipina perlahan terkikis. Spanyol melibatkan orang-orang kristen Filipina dalam wajib militer yang kemudian dimanfaatkan untuk menjadi prajurit ketentaraan dalam melawan orang Islam di Filipina Selatan. Meskipun begitu, umat islam dapat memukul mundur upaya penaklukan yang dilakukan Spanyol. Oleh karena itu terjadilah peperangan antar orang filipina sendiri dengan mengatasnamakan misi suci, dan dari sinilah timbul rasa saling benci dan tidak percaya antara kaum Muslim dan Kristen. Spanyol menerapkan politik *divide and rule* (pecah belah dan kuasa) serta *mission-sacre* (misi suci kristenisasi) terhadap orang-orang Islam. Bahkan orang Islam dijuluki dengan konotasi yang buruk sebagai Moor (moro) yang artinya orang buta huruf, jahat, tidak bertuhan dan tukang bunuh. Sejak saat itu julukan Moro melekat pada orang-orang islam yang mendiami kawasan Filipina tersebut (Helmiati, 2014: 252).

Dapat diringkas bahwa selama penjajahan kolonial Spanyol untuk pengembangan konflik di Mindanao dalam tiga

dimensi. Pertama, kolonialisasi Luzon dan wilayah Visayas Filipina termasuk Utara dan Timur Mindanao yang menyebabkan pembentukan kolektivitas sosial agama yang disebut Kristen dan telah menyebabkan perkembangan identitas Filipina. Kedua, strategi Spanyol *divide and rule* untuk menanamkan perasaan kebencian dan ketidakpercayaan antara Moro dan Kristen Filipina. Ketiga, agresi kolonial Spanyol yang melemahkan kesultanan Muslim Mindanao dalam ekonomi dan politik, sehingga memungkinkan untuk mempermudah penaklukan Moro dan pendudukan wilayah (Montiel, 2012, hal. 79-80).

Pada masa penjajahan kolonial, Amerika mengambil alih Filipina dari Spanyol melalui Perjanjian Paris pada Desember 1898 dengan harga 20 juta dolar dan kemudian melakukan penaklukan bersenjata terhadap Filipina dan pejuang Moro secara terpisah. Pemerintahan kolonial Amerika memberikan beberapa aturan terhadap perjuangan Moro yaitu: 1). pelabelan dan pengklasifikasian, 2). ketentuan diskriminatif hukum lahan publik, 3). program pemukiman kembali. Dalam sensus 1903, orang-orang dari pulau-pulau Filipina di klasifikasikan ke dalam dua kategori besar yaitu Kristen dan non-Kristen yang dipakai untuk tanda kaum yang beradab dan tidak beradab. Amerika melembagakan sistem Torrens

kepemilikan tanah pribadi, termasuk klasifikasi tanah, registrasi, dan sertifikat untuk swasta. Hukum kepemilikan tanah pribadi yang dibuat oleh pemimpin tradisional yaitu suku-suku non kristen dapat dinyatakan batal jika tidak ada persetujuan dari pemerintah. Hal ini diikuti oleh hukum lahan publik yang mempunyai tujuan dalam pendiskriminatifan tanah di wilayah sekitar (Montiel, dkk., 2012, hal. 82).

. Kemudian pada tahun 1919 dalam *Amandement to Public Land Act* (Amandemen Keputusan Lahan Umum), mengizinkan masyarakat yang menganut agama Kristen untuk mendapatkan rumah lebih dari 24 hektar namun masyarakat yang non-kristen hanya mendapatkan tanah 4 hektar. Maka terjadi perubahan kepemilikan tanah yang sebelumnya milik pribadi akan tetapi tidak terdaftar di pemerintahan diubah menjadi kepemilikan untuk umum. Adanya kebijakan ini menunjukkan ketidakseimbangan kepemilikan lahan dikarenakan penjajah yang datang ke Filipina sebagian besar beragama katolik dan mempunyai misi suci kristenisasi (Helmiati, 2014:253). Oleh karena itu penduduk pribumi Filipina Selatan yang beragama Islam merasa hak-haknya dirampas begitu saja oleh pemerintah. Penduduk muslim selatan tidak tinggal diam dengan kebijakan pemerintah kolonial yang menyoal perampasan tanah. Mereka

mengadakan pemberontakan dan memerangi para kolonial Spanyol dan Amerika untuk mempertahankan hak-haknya sebagai warga negara.

Filipina merupakan negara yang paling lama dijajah oleh Eropa di wilayah Asia Tenggara. Kolonialisasi Spanyol dan Amerika berusaha melakukan integrasi politik formal dengan Filipina Utara dan Selatan dalam banyak aspek seperti bidang sosial, budaya, pendidikan, pemerintahan, hukum dan lainnya. Sedangkan saat memasuki kemerdekaan Filipina dan hilangnya pengaruh kolonialisme ternyata pemerintahan Filipina yang terbentuk berupaya melanjutkan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh koloni Amerika dengan semboyan Filipinisasi dan Kristenisasi. Hal inilah yang menyebabkan kegelisahan di kalangan muslim Moro yang berada di Wilayah Selatan Filipina baik di masa awal kemerdekaan hingga saat ini (Ghofur, 2016 : 180).

Filipina Selatan telah lama menderita dari kerusuhan dan kekerasan sipil selama tiga dekade terakhir yang sebagian besar berdampak pada ambisi separatis penduduk Moro Muslim di Mindanao. Islam Mindanao sesungguhnya belum pernah ditaklukkan oleh penjajah baik Spanyol maupun Amerika Serikat, tradisional Islam ini telah lama berdiri dari orintasi mayoritas dari negara Filipina, bagaimanapun situasi

yang saat ini dialami oleh kaum muslim Mindanao telah diperburuk oleh beberapa faktor yakni (Cragin & Chalk, 2003, hal. 15):

- Mengabaikan ekonomi dan eksploitasi umum sumber daya lokal untuk mendorong pembangunan di pulau-pulau tengah dan utara Filipina
- Perampasan bertahap terhadap tanah leluhur Muslim oleh pemukim kristen (bertransmigrasi secara eksplisit dengan disponsori oleh Pemerintah untuk mengubah keseimbangan demografis di Mindanao)
- Berulang kali mencoba untuk mengasimilasi paksa ikatan *Communication Muslim* lokal ke dalam pemerintah Filipina Katolik yang lebih luas (kebijakan datang semakin jelas selama era Marcos).

## **B. Perjuangan Bangsa Moro**

Perjuangan muslim Bangsamoro dalam memperjuangkan hak-haknya sebagai warga negara masih tetap berlanjut meski kolonialisme di Filipina sudah berakhir. Meskipun kemerdekaan telah diberikan kepada negara Filipina, akan tetapi kemerdekaan, kebebasan hidup, tidak dirasakan untuk Bangsamoro di Filipina Selatan. Pemerintah masih cenderung melakukan kebijakan-kebijakan peninggalan kolonial dengan menggerus warga budaya muslim di Filipina

Selatan. Misi kristenisasi masih terus dilanjutkan dengan asimilasi budaya muslim yang berada di wilayah Fiilipina Selatan. Walaupun begitu warga muslim Moro masih melakukan perlawanan terhadap pemerintah untuk mendapatkan hak-hak mereka sebagai warga negara Filipina.

Pada maret tahun 1968 terjadi sebuah insiden yang dimana sekitar tiga puluh pemuda muslim muda dieksekusi di pulau Corregidor tepatnya di pintu masuk menuju teluk Manila. Pada awalnya sekitar 180 para pemuda muslim direkrut dalam pelatihan Jabidah oleh penguasa Militer yang mempunyai misi untuk menyusup Sabah. Jabidah merupakan sebuah operasi rahasia yang diadakan para militer untuk pelatihan dalam perang hutan, sabotase dan taktik gerilya. Meskipun para Militer membantah terhadap kejadian pembantaian, akan tetapi insiden ini tidak dilupakan oleh umat Muslim. Mereka menyalahkan Presiden secara langsung untuk tragedi Jabidah. Para pemimpin Muslim mengklaim bahwa kejadian ini merupakan penganiyaan pemerintah terhadap agama Islam (Majul, 1988, hal. 902).

Konflik bersenjata antara pemerintah di Manila dan kelompok Moro itu sangat dipicu oleh pembantaian Jabidah Maret 1968 pada masa pemerintahan Marcos. Hal ini menyebabkan pembentukan kelompok separatis Moro yang



awalnya dengan berdiri Gerakan Kemerdekaan Moro (MIM) dan akhirnya pecah menjadi Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF) yang dipimpin oleh Profesor Nurulhaji “Nur” Misuari seorang lulusan *University of the Philippines*, yang menjadi ketuanya. Dengan demikian, pemberontakan Moro mulai terorganisir dan ditata dengan seksama (Galeriana & Ragandang, 2018, hal. 13). Dibawah akan lebih dijelaskan lagi terhadap kelompok-kelompok pembebasan Bangsamoro yaitu MNLF, MILf dan ASG.

#### **a. Moro National Liberation Front (MNLF)**

MNLF merupakan kelompok pembebasan Bangsamoro yang dibentuk oleh Nur Misuari. Ia merupakan seorang akademisi di Universitas Filipina pada tahun 1969. Kelompok ini dibentuk untuk membebaskan hak-hak Bangsamoro yang ketika itu di marginalisasi oleh pemerintahan Filipina terlebih lagi dari tragei pembantaian Jabidah. Dikarenakan Pemerintahan Ferdinand Marcos mengambil tindakan yang represif untuk menghadapi konflik yang ada di Mindanao. Hal inilah yang membuat gerakan ini muncul dan memberikan perlawanan terhadap kebijakan pemerintah. Gerakan MNLF juga mendapatkan berbagai dukungan dan bantuan baik berbentuk finansial maupun material dari negara-negara Islam di Timur Tengah. Seperti pemimpin Lybia yaitu

Muammar Khadaffy, dan dari Organisasi Konferensi Islam (OKI). Sejak tahun 1972 OKI sering membicarakan permasalahan warga Muslim Filipina Selatan, bahkan dijadikan OKI sebagai agenda tahunan dengan Negara-negara anggota. OKI mendesak pemerintah Filipina yang pada waktu itu pada masa pemerintahannya Marcos guna untuk menyelesaikan permasalahan dengan Muslim Moro (Riswanto, Melay, & Tugiman, 2010).

Selama periode tahun 1973-1975 tentara MNLF telah menerjunkan 30.000 pejuang yang didukung oleh impor senjata dari Malaysia. MNLF juga mempunyai hubungan yang kuat dengan negara-negara Organisasi Konferensi Islam, negara-negara Arab, Pakistan dan sebagian besar anggota ASEAN. Pada masa Presiden Marcos yang memerintah negara Filipina Tahun 1969-1986 memfokuskan untuk melawan gerakan separatis Bangsamoro dengan strategi darurat militer dengan tanpa memberi keamanan pada penduduk. Tentara Filipina dikerahkan sekitar 70-80 persen dari pasukannya dalam menanggapi pemberontakan MNLF. Akhirnya antara MNLF dan tentara Filipina terlibat peperangan dimana sekitar 50.000 orang tewas. Fase ini berakhir dengan penandatanganan *Tripoli Accord* oleh pemerintah Filipina, MNLF, Libya dan Organisasi Konferensi Islam. Perjanjian ini menetapkan pada otonomi

daerah yang akan diadakan di 13 provinsi di pulau Mindanao dimana sebagian besar umat Islam Filipina hidup. Dan sebagian dari perjanjian ini dideklarasikan gencatan senjata di tiga provinsi dan sepuluh kota pada 26 Desember tahun 1976. Namun, negosiasi perdamaian melalui perjanjian tersebut hanya berumur pendek sampai April 1977 dan permusuhan antara Pemerintah dengan MNLF kembali memanas di tahun itu (Paul, Clarke, Grill, & Dunigan, 2013, hal. 348).

Pada tahun 1981 pemerintah mengerahkan 35.000 tentara Filipina di provinsi-provinsi selatan dimana kelompok MNLF beroperasi. Sementara itu, kekuatan pertempuran MNLF menurun menjadi sekitar 15000 kombatan pada tahun 1983 dengan gangguan dari MILF sehingga kekuatan kelompok MNLF tidak dapat pulih sepenuhnya. Ketika presiden Marcos digulingkan dalam kudeta pada bulan Maret 1986, Corazon Aquino mengambil alih presiden dan memilih komisi untuk menyusun konstitusi baru Filipina dengan ketentuan otonomi muslim Mindanao. Dengan begitu pemerintah sukses bernegosiasi dengan MNLF untuk gencatan senjata pada tahun ini. Pada bulan Januari 1987, MNLF menandatangani perjanjian dengan pemerintah dimana ia melepaskan tujuannya untuk kemerdekaan bagi wilayah

Muslim di negara itu dan menerima tawaran daerah otonom (Paul, Clarke, Grill, & Dunigan, 2013, hal. 350).

Serangkaian perundingan telah dinegosiasikan antara pemerintah Filipina dengan MNLF. Perjanjian perdamaian diawali sejak disepakatinya *Tripoli Agreement* antar kedua belah pihak pada tanggal 23 Desember 1976 di Libya. Dalam *Tripoli Agreement* telah disepakati adanya daerah otonomi khusus bagi penduduk Moro di Filipina Selatan. Akan tetapi beberapa anggota MNLF merasa kecewa terhadap keputusan dilakukannya perjanjian perdamaian dengan Pemerintah. Hashim Salamat dan Abdulrajjak Janjalani yang tidak setuju atas perjanjian perdamaian akhirnya keluar dari MNLF dan membuat faksi lain. Hashim Salamat meneruskan perjuangan pemberontakan dengan membentuk *Moro Islamic Liberation Front* (MILF), sedangkan Abdulrajjak Janjalani membentuk gerakan *Abu Sayyaf Group* (ASG) (Gumilar, 2013).

Pada bulan September 1996, pemerintah dan MNLF menandatangani *Final Peace Agreement* yang disediakan untuk proses dua tahap dalam pemberian otonomi daerah kepada orang-orang Moro. Fase persiapan dalam 3 tahun di mana wilayah yang dicakup oleh perjanjian Tripoli 1976 akan menjadi fokus perdamaian dan upaya pembangunan dengan pembentukan daerah otonomi baru yang akan menjadi

perluasan ARMM yang ada. Dengan dukungan penuh Ramos, Misuari terpilih sebagai gubernur ARMM. Bagaimanapun banyak dari anggota MNLF kehilangan kepercayaan pada kepemimpinan Misuari, beberapa pemimpin MNLF yang merupakan komite pusat “Dewan 15” memilih berpisah dari MNLF. Dalam pemilihan ulang sebagai gubernur ARMM, Presiden Gloria Macapagal Arroyo mendukung pencalonan pemimpin MNLF lain yaitu Parouk Hussin. Dua minggu sebelum pemilu ARMM, pengikut Misuari menyerang pos militer di Jolo dan Zamboanga. Puluhan orang tewas dan Misuari ditangkap, didakwa dengan pemberontakan dan ditahan hingga tahun 2008 (Quimpo, 2016, hal. 5).

Pada tanggal 12 Agustus 2013 Nur Misuari, pemimpin faksi dalam *Moro National Liberation Front* (MNLF) menyatakan kemerdekaan Bangsamoro Republik dengan mengklaim pulau-pulau Mindanao, Basilan, Sulu, Tawi-tawi dan Palawan di Filipina Selatan serta wilayah Malayisia utara Sabah dan Sarawak. Kemerdekaan sepihak ini tidak diakui oleh pemerintah Filipina dan Organisasi Internasional non-pemerintah. Pada tanggal 9 September 2013, elemen MNLF yang setia pada Misuari (dikenal sebagai RMEs) berusaha untuk menaikkan bendera Republik Bangsamoro di balai kota Zamboanga. Kekerasan kemudian pecah antara RMEs dengan

Angkatan Bersenjata Filipina (AFP) yang berlangsung sepanjang bulan. Dari peristiwa ini setidaknya merenggut 200 nyawa serta penduduk berjumlah sekitar 100.000 memilih untuk meninggalkan rumah mereka (Ang, 2013, hal. 10).

#### **b. Moro Islamic Liberation Front (MILF)**

Terbentuknya gerakan *Moro Islamic Liberation Front* tidaklah terlepas dari konflik internal yang ada pada tubuh MNLF. *Moro Islamic Libertaion Front* secara resmi didirikan pada tahun 1984, berawal dari sebuah kelompok yang dipimpin oleh anggota Komite Sentral yaitu Salamat Hashim yang keluar dari MNLF dikarenakan perbedaan ideologi perjuangan dengan ketua MNLF. Kelompok ini berorientasi lebih religius dari gerakan induknya dengan menekankan promosi cita cita Islam daripada mengejar tujuan sederhana untuk nasionalis Moro. Menurut pemimpinya tujuan politik debentuknya MILF adalah untuk penciptaan sebuah negara Islam di semua daerah di mana umat Islam merupakan mayoritas di Filipina selatan. Tujuan penting dari gerakan ini yaitu membuat pemerintahan sendiri dengan dikenal sebagai *Moro Islamic Republic (MIR)*, untuk membangun sistem pemerintahan yang menjunjung tinggi dan menerapkan syariah Islam dalam semua aspek kehidupan sehari-hari. Tujuan

tersebut akan dicapai melalui strategi gabungan dari dakwah Islam dan *Jihad* (perang suci) (Rabasa & Chalk, 2001, hal. 87).

MILF dianggap sebagai representatif dari masyarakat Mindanao menggantikan kelompok MNLF. Oleh karena itu, proses perdamaian Pemerintah Filipina dengan MILF hanya dimulai pada tahun 1997, meskipun proposal perdamaian resmi dimulai tahun sebelumnya. Kelompok bersenjata Filipina telah mengakhiri pemberontakan mereka. MILF yang telah diklaim memiliki lebih dari 10.000 kekuatan kombatan (kelompok bersenjata terbesar di Filipina) telah setuju untuk menonaktifkan senjata dan pasukan untuk hidup normal setelah semua poin kesepakatan yang dilakukan. Dengan ini angkatan bersenjata Filipina bisa lega dari beban memadamkan pemberontakan Moro dan kemudian dapat fokus tugas asli yaitu pertahanan daerah eksternal yang sama-sama membutuhkan perhatian terutama sengketa wilayah dengan Cina di laut Filipina Barat. Pemerintah dan MILF telah bersepakat bahwa untuk meningkatkan perdamaian itu harus berlabuh pada *subsidiaritas*. Istilah ini berarti bahwa penduduk setempat lebih tahu konteks dan sifat masalah mereka. Dengan demikian mereka berada dalam kondisi yang lebih baik untuk mengidentifikasi pendekatan yang paling layak untuk

memecahkan masalah mereka (Calballero & Torres, 2016, hal. 31).

Proses perdamaian pemerintah dengan kelompok MILF bertujuan untuk menyelesaikan empat dekade konflik bersenjata panjang, antara penduduk Muslim Mindanao dan Militer. Ini dimulai pada tahun 1996, dan mencapai tonggak sejarah dengan tanda tangan pada 2014 pada Perjanjian Komprehensif Bangsamoro (CAB). Perjanjian mengharapkan penciptaan wilayah oleh Kongres Filipina, dari yang benar-benar otonom, demokratis, dan Islam 'Bangsamoro' (Tanah Moro). Hal ini dilengkapi dengan beberapa lampiran, yang mengatur program pembangunan sosial-ekonomi dan proses keadilan transisional. Para pendukung proses perdamaian berpendapat bahwa perdamaian dapat mengatasi ekstremisme kekerasan di Mindanao karena akan memberikan kesempatan orang-orang Moro untuk memerintah diri mereka sendiri, melalui pembentukan Bangsamoro, sehingga meminimalisir dalam menggunakan kekerasan untuk mendirikan sebuah wilayah Islam (Loesech, 2017, hal. 96).

Namun pada bulan Januari 2015, sebuah operasi komando yang menewaskan teroris Malaysia di tanah rawa Maguindanao telah memicu bentrokan antara MILF dengan Pemerintah yang mengakibatkan kematian terhadap 44



Pasukan Khusus Aksi (SAF) dari Polisi Nasional Filipina (PNP) (De Castro, 2019, hal. 154). Tragedi Mamasapano ini berdampak pada pemerintahan Presiden Benigno Simeon Aquino III ke dalam krisis politik terburuk. Terutama eksekusi brutal terhadap SAF yang direkam di video dan diposting di media sosial telah memicu kemarahan publik. Bagaimanapun tragedi Mamasapano memiliki dampak yang lebih besar bagi perdamaian Muslim Mindanao. Tragedi ini memicu curahan kuat anti-Moro dan sentimen anti Muslim yang secara umum kaum Muslim digambarkan sebagai pembunuh, haus darah dan berbahaya (Quimpo, 2016, hal. 12).

### **c. Abu Sayyaf Group (ASG)**

*Abu Sayyaf Group* dibentuk pada awal 1990-an dengan memobilisasi para pejuang Filipina yang berperang melawan Uni Soviet di Afghanistan dan mempertahankan hubungannya dengan Al Qaeda sampai Negara Islam dibentuk. Pendiri Abu Sayyaf adalah Abdulrazak Abubakar Janjalani, yang memimpin kelompok sampai Desember 1998, dan tewas oleh polisi di desa Lamitan di pulau Basilan. Tujuan utamanya adalah membersihkan semua pengaruh Kristen di Filipina selatan dan mendirikan Negara Islam Mindanao yang independen. BIFF dan ASG, dari waktu ke waktu, telah menegaskan dukungan mereka untuk Negara Islam melalui

media sosial. Keduanya pertama kali menyatakan kesetiaan mereka kepada Negara Islam pada tahun 2014, ASG pada bulan Juni dan BIFF pada bulan Agustus (Gupta & Routray, 2018).

Kelompok *Abu Sayyaf Group* merupakan masalah lain bagi pemerintah Filipina, dan itu berada di luar ranah setiap solusi politik. ASG telah mencapai ketenaran dikalangan Internasioanl dengan pembuatan berita atas tindakannya. Aksi penculikan 21 turis Asia dan Barat di pulau resor Malaysia sipadan pada bulan April dengan meminta tebusan sebesar US \$ 20 Juta, dengan ini menambah situasi konflik Mindanao menjadi lebih kompleks. Negosiasi pembebasan atas sandera dilakukan berlangsung selama enam bulan dan bahkan melibatkan perantara dari negara lain yaitu Libya. Dengan situasi ini berdampak pada menegangnya hubungan diplomatik dengan beberapa negara yang warga negaranya di sandera (Labrador, 2001, hal. 226). Pemerintah Filipina menganggap bahwa kelompok *Abu Sayyaf Group* adalah kelompok teroris dan Islam radikal, karena kelompok ini sering melakukan tindakan-tindakan penculikan dan meminta tebusan uang. Kelompok Abu Sayyaf tidak hanya melakukan aksi teroris tetapi juga dianggap sebagai kelompok yang selalu mengintervensi dan mengacaukan perjanjian perdamaian

antara pemerintah Filipina dengan MNLF (*Moro National Liberation Front*).

Tujuan utama dari kelompok Abu Sayyaf adalah untuk membentuk suatu negara merdeka yang menggunakan hukum-hukum syari'ah Islam sebagai dasar otoritas moral dari undang-undang negara, dan kemudian hukum syari'ah tersebut dijalankan dan dipatuhi oleh warga negara yang tinggal di negara tersebut. Rommel Banlaoi kemudian memberikan penjelasan mengenai 'Empat Dasar Kebenaran' yang diterbitkan oleh Abdulrajak Janjalani pada tahun 1993-1994 sebagai panduan dasar bagi kelompok Abu Sayyaf, (Wibisono, 2016:126):

1. Tujuan kami tidak untuk membangun atau mempromosikan faksi dan perpecahan dalam perjuangan kelompok Muslim, karena hal tersebut bertentangan dengan ajaran Islam. Tujuan dari kelompok Abu Sayyaf adalah untuk menjadi jembatan antara pasukan revolusioner baik dari MNLF dan MILF yang peran dan kepemimpinannya dalam perjuangan ini tidak dapat diabaikan,
2. Tujuan strategis utama kami adalah pembentukan sebuah negara Islam murni yang 'sifat, makna, lambang dan tujuannya' identik dengan kedamaian. Kelompok Abu

Sayyaf menyatakan bahwa mereka akan menghormati kebebasan beragama, bahkan dalam konteks sebuah negara Islam, mereka menyatakan “hak-hak orang Kristen akan dilindungi selama mereka mematuhi hukum negara Islam.”

3. Advokasi melalui tindakan peperangan merupakan kebutuhan selama tetap terjadi ‘penindasan, ketidakadilan dan klaim yang sewenang-wenang’ terhadap umat Muslim.
4. Peperangan mengganggu perdamaian hanya untuk mencapai tujuan yang benar dan nyata akan nilai kemanusiaan, dalam penegakan keadilan dan kebenaran untuk semua di bawah naungan hukum al-Qur’an yang mulia dan Sunnah yang murni.

Dibalik pembentukan kelompok Abu Sayyaf Group dapat dilihat bahwa Abdul Rajjak janjalani bermotivasi untuk mencari keadilan bagi semua kelompok minoritas Muslim Moro di Filipina Selatan. Bngsamoro sudah lama mengalami marginalisasi budaya, ekonomi, pendidikan dan hak untuk hidup. Oleh karena itu menurut kelompok Abu Sayyaf Group, perjuangan yang paling mulia untuk membela islam di jalan Allah dengan Jihad Fi Sabilillah. Maka satu-satunya jalan

untuk memerangi pemerintahan dengan cara mengangkat senjata.

Sejak tahun 1991-2000, tercatat kelompok Abu Sayyaf telah terlibat dalam 378 tindakan terorisme yang meliputi tindakan pengeboman, penyerangan, dan pembunuhan yang mengakibatkan kematian sebanyak 288 orang warga sipil. Pada rentang periode yang sama kelompok Abu Sayyaf tercatat telah melakukan tindakan penculikan dan penuntutan uang tebusan sebanyak 640 kali dan melibatkan korban penculikan sebanyak 2.076 korban. Kemudian pada tanggal 16 Februari 2014, diduga melakukan penculikan terhadap sepasang suami istri di kepulauan Jolo. Suami istri, kedua mereka adalah karyawan perusahaan lokal, diculik oleh enam tersangka teroris dari kelompok Abu Sayyaf di depan rumah mereka di San Raymudo village di Jolo. 31 Maret 2014, kelompok Abu Sayyaf melakukan penculikan terhadap seorang wanita bernama Benita Enriquez Latonio, seorang penduduk dari Barangray Talisayan yang menjabat sebagai Kepala Sekolah di Sekolah Dasar Manggal, Kota Sumisip, Basilan (Wibisono, 2016: 130-131).

Tumbuh militansi di Filipina selatan telah meningkatkan ancaman ke daerah tri-perbatasan yang meliputi kepulauan Sulu, Sabah dan Sulawesi. Daerah, yang dikenal

untuk jaringan penyelundupan, perdagangan senjata dan penculikan, telah menjadi sarang untuk ekstremisme dan jihadisme. Dari bulan Maret sampai Juli 2016, ASG melakukan total lima penculikan-untuk-uang tebusan serangan terpisah di daerah. Kemudian pembajakan sebuah kapal berlayar kargo Korea Selatan melalui Laut Sulu dan penculikan kapten kapal Korea Selatan dan Dua warga Kanada John Ridsdel dan Robert Hall, diculik oleh ASG pada bulan September 2015, dipenggal oleh anggota ASG pada bulan April dan Juni 2016 setelah keluarga mereka gagal untuk datang dengan uang tebusan. Kematian mereka menghasilkan kecaman internasional terhadap teroris yang tidak menunjukkan pelambatan terhadap operasi penculikan mereka. ASG dilaporkan telah mengumpulkan US \$ 7,3 juta uang tebusan hanya di pertengahan pertama tahun 2016 (Habulan, Philippines, 2017, hal. 27).

Baru-baru ini terjadi konflik yang dikenal dengan Pertempuran marawi yang bermula pada tanggal 23 mei 2017. Pertempuran ini merupakan konflik bersenjata dalam waktu lima bulan antara pasukan keamanan Pemerintah filipna dengan para militan atau teroris dari jaringan ISIS, termasuk kelompok *Maute Group* dan *Abu Sayyaf Group*. Krisis Marawi menyebabkan pembunuhan 800 jihadis bersama 163 tentara

dan sekitar 47 warga sipil. Tragedi itu telah menghancurkan kota, mengusur lebih dari 400.000 orang. Diperkirakan 70 persen dari penduduk Marawi yang terlantar kembali ke kota, meskipun sebagian besar kota tetap dalam kondisi kehancuran. Membangun kembali kota sekarang bukan hanya tantangan logistik, tetapi juga dibumbui dengan komplikasi keuangan dan hukum. Namun, dari sudut pandang militer menganggap bahwa operasi telah berhasil menghilangkan Isnilon Hapilon, pemimpin Negara Islam di Filipina. Hapilon dinyatakan meninggal pada 16 Oktober 2017 dan kota Marawi kembali ke tangan pemerintah setelah pengepungan selama lima bulan (Gupta & Routray, 2018).

Dalam pertempuran Marawi Presiden Duterte memberlakukan kembali kebijakan darurat militer untuk menangkap Hapilon pemimpin negara Islam Filipina. Duterte menyatakan bahwa undang-undang darurat militer di Mindanao terutama Marawi merupakan sama kerasnya dengan yang diterapkan di masa pemerintahan Marcos yang berlaku selama sembilan tahun. Hal ini tentunya akan mengancam keamanan manusia di wilayah Mindanao mengingat pada masa pemerintahan Marcos, polisi dan tentara menyiksa, menculik dan membunuh ribuan orang yang kritis terhadap kediktatoran Marcos (Apriani, 2016, hal. 235).

Pada bulan Mei tahun 2018, Duterte mengimbau para militan Islam untuk meninggalkan permusuhan dan memulai dialog. Panggilan dilakukan pada bulan Juli 2018 ke ASG untuk negosiasi, akan tetapi panggilan tersebut belum direspon positif oleh ASG. Kemudian pada 31 Juli 2018, sebuah bom mobil meledak di sebuah pos pemeriksaan keamanan di Lamitan provinsi Basilan yang menewaskan 11 orang termasuk seorang komandan detasemen dari Pasukan Khusus Militer dari 19 militer, seorang wanita dan seorang anak. Negara Islam mengklaim bertanggung jawab dengan menyebut Abu Kathir, seorang Jihadis Maroko sebagai orang yang melakukan serangan itu. Kegiatan militan juga berfokus pada pengorganisasian kembali, perekrutan dan pelatihan ulang. ASG bertujuan untuk menambah kekuatannya saat ini kurang dari 500 anggota. Orang baru direkrut dari Madrasah atau sekolah Islam, mereka anak-anak dan kerabat anggota kelompok Maute yang meninggal selama pengepungan Marawi (De Castro, 2019, hal. 156).

### **C. Eskalasi Konflik**

Untuk memperjelas pemetaan konflik yang terjadi di Filipina Selatan penulis ingin menjabarkan terlebih dahulu faktor-faktor apa saja yang berperan dalam terjadinya konflik Bangsamoro ini. Pertama, faktor global. Perkembangan



kelompok Islam ekstrimis yang terdapat di timur tengah menjadi faktor penyebab dorongan gerakan separatis Bangsamoro untuk melakukan penyerangan terhadap pemerintah. adanya hubungan yang terjalin dengan beberapa organisasi Islam, yaitu Al-Qaeda yang menyebabkan gerakan separatis Bangsamoro menentang negara Filipina. Keinginan dan tujuan yang sama untuk mendirikan negara Islam dan menjadi landasaan bersama bagi mereka untuk melakukan kerja sama

Kedua, faktor negara. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah diantaranya merupakan penyebab terjadinya konflik antar pemerintah dengan gerakan separatis Bangsamoro, yaitu kebijakan pemerintah yang memindahkan penduduk kristen dari Filipina Utara ke Filipina Selatan tepatnya di daerah Mindanao. Telah diketahui bahwa daerah Mindanao ini sebelumnya merupakan daerah mayoritas Muslim, sehingga masyarakat muslim Moro menganggap bahwa pemindahan penduduk Kristen dapat membahayakan entitas muslim Moro di Mindanao. Oleh karena itu muncullah perlawanan rakyat Moro terhadap kebijakan pemerintah tersebut.

Ketiga, faktor pihak yang berkonflik. Kelompok muslim moro merasakan adanya ancaman terhadap kehadiran

masyarakat Kristen dari utara ke Mindanao. Hal ini disebabkan karena Bangsamoro merupakan kelompok etnik minoritas di Filipina. Muncul kekhawatiran Bangsamoro akan adanya diskriminasi dari masyarakat Kristen Filipina. Oleh karena itu tumbuhlah keinginan Bangsamoro untuk melepaskan diri dari negara Filipina dan bertujuan untuk mendirikan negara Islam.

Dalam penjelasan sejarah dan dinamika konflik diatas dapat dilihat bahwa konflik yang terjadi antar pemerintah dan gerakan separatis Bangsamoro telah meliputi segitiga konflik yang disuguhkan oleh John Galtung. Segitiga konflik ini merupakan urutan terbentuknya konflik yang terdiri atas *Attitudes* (A), *Behaviour* (B), dan *Cintradiction* (C). Galtung berpendapat bahwa ketiga komponen tersebut harus hadir dalam sebuah konflik. Galtung melihat konflik sebagai proses dinamis dimana struktur, sikap dan perilaku secara konstan berubah dan mempengaruhi satu sama lainnya. Ketika konflik muncul, konflik menjddai formasi konflik ketika kepentingan pihak-pihak yang bertikai masuk ke dalam konflik atau hubungan dimana mereka berada menjadi penindas. Kemudian pihak-pihak yang bertikai mengorganisasikan diri mereka demi mencapai kepentingan mereka (Miall, Ramsbotham, & Woodhouse, 2000: 20-23).

*Attitude* dalam konflik juga berarti adanya penolakan terhadap superioritas pihak lain. Asumsi yang dibangun bisa bersifat positif dan negatif, akan tetapi dalam konflik kekerasan kecenderungan yang muncul adalah menciptakan asumsi negatif terhadap pihak musuh sebagai akibat dari kemarahan dan ketidakamanan yang dirasakan. Pada konflik Bangsamoro faktor negara dengan kebijakan pembangunan besar-besaran bagi kaum Kristen di wilayah Mindanao menjadi akar munculnya konflik kekerasan langsung. Dengan begitu hak-hak muslim untuk mendapatkan kesejahteraan dari ekonomi dan sosial budaya tereksplorasi oleh kaum kristen Filipina di Mindanao Kebijakan negara yang memindahkan penduduk Kristen utara ke daerah Filipina selatan memicu tumbuhnya gerakan separatis Bangsamoro. Terbentuknya gerakan separatis didasari oleh rasa keterancaman dan ketidakamanan dari kebijakan pemerintah tersebut. Munculnya gerakan separatis bertujuan untuk melawan pemerintah yang sewenang-sewenang dalam membuat kebijakan.

*Behavior* merupakan mental, ekspresi verbal atau fisik yang timbul dalam konflik. Bentuk bentuk dari behavior dapat meliputi tindak kekerasan, penghinaan, kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia. Tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh pemerintah Filipina terlihat dari adanya

perbedaan perlakuan yang didapat oleh masyarakat di wilayah Mindanao. Masyarakat Kristen mendapatkan akses yang besar dalam bidang ekonomi, politik, pendidikan dan kesehatan. Sedangkan masyarakat Mindanao tidak mendapatkan akses yang serupa secara layak dari pemerintah. disamping itu lahirnya gerakan separatis dari Bangsamoro memicu tindakan represif dari pemerintah. pada masa pemerintahan Marcos diberlakukan kebijakan militerisasi yang menyebabkan korban jiwa berjatuhan. Diberlakukannya kebijakan *Martial Law* oleh pemerintah cenderung melahirkan berbagai penyiksaan, pembunuhan, ataupun dengan mengirim pasukan sipil untuk membantai masyarakat Mindanao.

*Contradiction* merujuk pada dasar situasi konflik, termasuk adanya ketidakcocokan tujuan yang ada atau yang dirasakan oleh pihak-pihak yang bertikai. Ini disebabkan oleh adanya ketidakcocokan antar nilai sosial dan struktur sosial. *Contradiction* menjadi bagian penting karena hal ini menyebabkan tindakan kekerasan dan perilaku dari kedua belah pihak yang bertikai. Pemerintah Filipina mempunyai misi dan tujuan untuk mengasimiliasi muslim Bangsamoro ke dalam tubuh nasional dengan cara menghapuskan budaya muslim dari wilayah Mindanao. Disamping itu pemerintah mempunyai pandangan bahwa kaum muslim Moro merupakan kaum yang

terbelakang dan penghambat dalam pembangunan negara. Oleh karena tindakan diskriminatif dari pemerintah, gerakan separatis bangsamoro mempunyai tujuan untuk membebaskan rakyatnya dari tekanan represif pemerintah Filipina. Mereka tidak mendapatkan keamanan dari pemerintah melainkan ancaman penggerusan budaya muslim dari pemerintah. Maka dari itu muncullah keinginan Bangsamoro untuk memisahkan diri dari Filipina.

Dari pemetaan konflik yang telah dijabarkan diatas terlihat adanya kesinambungan antara *attitude, behaviour* dan *contradiction*. Hubungan ini melahirkan transformasi konflik kekerasan langsung dan perubahan sosial yang lebih jauh dimana individu dan kelompok yang ditekan atau disingkirkan dapat muncul untuk mengartikulasikan kepentingan mereka dan menantang norma-norma dari struktur kekuasaan yang ada. Meskipun keduanya telah mencoba melakukan perjanjian perdamaian, akan tetapi jika salah satu pihak tidak dapat melebur dan masih tetap dalam tujuan utama mereka, maka konflik akan terus berkelanjutan. Ketidakcocokan tujuan antar kedua belah membutuhkan kompromi untuk dapat menerima perbedaan-perbedaan yang ada. Seharusnya resolusi konflik hadir untuk membantu pihak-pihak yang bertikai berpindah menuju arah yang positif.